

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional merupakan salah satu diantara begitu banyak kebijakan dalam dunia pendidikan. Hal ini merupakan perwujudan dari upaya untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang dituang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan juga sebagai pengaruh dari perubahan sosial yang disebut globalisasi yang kemudian melahirkan standarisasi pendidikan. Sebagaimana yang ditulis H.A.R Tilaar dalam "*Standarisasi Pendidikan Nasional*" tahun 2006 dalam dunia pendidikan nasional dibutuhkan standar yang penting untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa tujuan ideal, tujuan jangka panjang, jangka menengah dan rencana strategis. <sup>1</sup>Hal ini dikarenakan sejatinya dalam pendidikan dalam proses perubahan sosial menempati dua kedudukan penting. Pertama, pendidikan adalah untuk mewarisi nilai-nilai tradisional dalam proses pendidikan yang menjadikan pendidikan sebagai subjek aktif dalam perubahan sosial. Kedua, pendidikan adalah sistem yang mesti diubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>H.A.R. Tilaar, "Standarisasi Pendidikan Nasional : Suatu Tinjauan Kritis", (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm.75,

<sup>2</sup>Nanang Martono, "Sekolah Publik VS Sekolah Privat dalam Wacana Kekuasaan : Demokrasi dan Liberalisasi Pendidikan (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm.2,

RSBI adalah singkatan dari Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang mengimplementasikan standar internasional dalam proses pembelajaran di sekolah. Kebijakan ini merupakan perwujudan dari penempatan pendidikan sebagai sebuah sistem yang harus mengikuti perkembangan masyarakat yang artinya pendidikan menjadi objek dari perubahan sosial. Namun, pada kenyataannya kebijakan ini banyak menuai kecaman bahwa merupakan dualisme terhadap dunia pendidikan di Indonesia sehingga menghapuskan nilai-nilai tradisional dalam pendidikan sebab mengadopsi standar pembelajaran negara luar negeri. Selain itu kebijakan ini dinilai juga menjadikan pendidikan memiliki tingkatan kelas.

Kebijakan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) adalah sebuah kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2007 . Pada dasarnya, diskusi tentang RSBI dimulai pada akhir 1999 dan awal 2000-an. Kemudian, pemberlakuan kebijakan berlandaskan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 50 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melaksanakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, "Penghapusan Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional", (*Jurnal Politica* Volume. 4 Nomor 2 Tahun 2013), hlm.265

Dalam Renstra Pendidikan (2009-2014), strategi kedua dan strategi ketiga di dalamnya, diterangkan bahwa :

1. Sekurang-kurangnya 85% kabupaten/kota memiliki SD SBI atau RSBI,
2. Sekurang-kurangnya 75% kabupaten/kota memiliki SMP SBI atau RSBI,
3. Sekurang-kurangnya 85% kota memiliki 2 SMP SBI atau RSBI,
4. Sekurang-kurangnya 70% kabupaten/kota memiliki SMA/ SMLB dan SMK SBI atau RSBI.<sup>4</sup>

Namun, hal tersebut berubah drastis ketika pada akhir tahun 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Amar Keputusan Nomor 5/PUU-X/2012 yang menghapuskan program RSBI yang telah ada di SD, SMP, dan SMA/SMK. Alasan utamanya adalah karena kebijakan ini dinilai menghadirkan diskriminasi dalam pendidikan yang merupakan insubordinasi terhadap UUD 1945 yang didalamnya tercantum mengenai hak bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan.<sup>5</sup> Keberadaan sekolah RSBI dinilai oleh sejumlah pengamat pendidikan sebagai kebijakan yang membelakangi hak-hak masyarakat tidak mampu.

Perpesktif ini didukung oleh munculnya data bahwa sepanjang perjalanan implementasi kebijakan RSBI selama 6 tahun di Indonesia tidak berjalan dengan baik secara merata dan menimbulkan berbagai kontroversi. Mahkamah Kontitusi mengatakan bahwa pemerintah sejatinya memang harus memberi

---

<sup>4</sup>Mohammad Nuh, “ Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2011”, (Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), hlm.18

<sup>5</sup> Putusan MK Bubarkan RSBI. <http://www.jpnn.com/read/2013/01/08/153565/>  
*Putusan-MKBubarkan-RSBI*, Diakses pada tanggal 09 Oktober 2021, pukul 20.14 WIB

ruang perlakuan khusus bagi mereka yang punya kemampuan khusus, namun relitanya pelayanan berbeda tidak dapat dilakukan dalam bentuk sekolah RSBI/SBI dan non RSBI/SBI, karena hal itu mengisyaratkan terdapat perlakuan berbeda dari pemerintah baik itu dari segi fasilitas, pembiayaan maupun sarana prasarana, dan RSBI/SBI mendapatkan fasilitas yang lebih. Sementara itu, sekolah non RSBI/SBI fasilitasnya sangat terbatas. Fakta lain menunjukkan bahwa siswa di sekolah RSBI harus membayar biaya lebih banyak sehingga hanya masyarakat mampu yang bisa sekolah di RSBI.<sup>6</sup>

Namun, fakta bahwa terdapat perlakuan khusus dalam penerapan kebijakan RSBI juga tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa selama periode 2007-2012 tersebut terdapat sebuah peningkatan kualitas atau mutu pendidikan yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari sistem PPDB pada sekolah yang berstatus RSBI yang diseleksi secara mandiri dengan serangkaian tes atau ujian bertahap yang membuat peserta didik tersaring dari dan memiliki daya saing yang mengarah kepada peningkatan kecerdasan dan kualitas. Penerapan kurikulum berbasis Internasional yang menjadi pedoman pelaksanaan pembelajaran juga menghadirkan tenaga pengajar yang terqualifikasi dan terlatih dalam pembelajaran dua bahasa atau (Bilingual) yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang berujung kepada lulusan yang mampu memiliki kompetensi berbahasa asing. Lulusan-lulusan dari sekolah yang berstatus RSBI juga mampu berkompetisi dan bersaing secara global.

---

<sup>6</sup> Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, "Penghapusan Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional", (*Jurnal Politica* Volume. 4 Nomor 2 Tahun 2013), hlm.12

Berdasarkan hal tersebut, ketertarikan penulis terletak pada kajian historis atau menelaah realitas di masa lampau terkait dengan implementasi kebijakan RSBI yang juga berlaku di Provinsi Sumatra Barat, khususnya di Kota Padang. Penelitian ini adalah jawaban tentang bagaimana penerapan kebijakan RSBI dalam perkembangannya pada satu Sekolah Menengah yang termasuk ke dalam jenjang pendidikan dasar yang menjadi RSBI adalah SMP N 8 Padang. SMP Negeri 8 Padang berdiri pada tanggal 24 Oktober 1977 dalam keadaan gedung yang masih menumpang di gedung SD Inpres Marapalam. Proses belajar mengajar pada waktu itu diadakan pada sore hari. Selanjutnya, gedung baru SMP Negeri 8 Padang yang terletak pada Jl. Dr. Sutomo diresmikan oleh Direktur Direktorat PMU Ditjen PMD Depdikbud RI Dr. Benny Suprpto dan Gubernur Sumatra Barat Ir. H. Azwar Anas pada tanggal 13 Desember 1977 dan digunakan untuk belajar mengajar pada tanggal 3 Januari 1978 hingga saat ini.<sup>7</sup>

Sekolah ini memperoleh predikat sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pertama di Sumatra Barat dari 100 sekolah RSBI Angkatan I di seluruh Indonesia pada tahun 2007. Predikat ini diperoleh melalui pembuatan RPS untuk mengajukan sekolah layak dan mampu menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. RPS inilah yang akan diajukan ke Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

---

<sup>7</sup> Arsip Sekolah SMP N 8 Padang

Sebagai Sekolah RSBI pertama di Sumatra Barat, membuat SMP N 8 Padang sebagai Sekolah dengan Akreditasi A dengan kurikulum berbasis SNP + X dan menghasilkan lulusan terbaik dan berprestasi mulai dari tingkat Provinsi hingga Nasional. Berbagai Kunjungan ke sekolah yang berada di Asia Tenggara juga menjadi bagian dari perjalanan SMP N 8 Padang. Predikat RSBI ini juga yang menjadikan SMP N 8 gencar melaksanakan pembangunan infrastruktur berupa perbaikan atau pembaruan gedung sekolah, penyediaan sarana belajar berupa media digital dan ketersediaan ruangan kelas yang lengkap dengan fasilitasnya. Pada masa ini, kualitas tenaga pengajar menjadi faktor penentu kelayakan sebuah sekolah menjadi RSBI yaitu kemampuan berbahasa Inggris dan kemampuan dalam menggunakan teknologi.

Penghapusan RSBI oleh MK pada tahun 2012 membuat status SMP N 8 Padang berubah menjadi Sekolah Rujukan. Sekolah Rujukan adalah julukan untuk sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan atau SSN. Masa RSBI hingga pasca RSBI ditiadakan dan menjadi Sekolah Rujukan menjadi sebuah periode yang termasuk ke dalam peristiwa sejarah. Mengingat sejarah sebagai sebuah peristiwa adalah "*einmalig*" yang berarti hanya terjadi satu kali. Menariknya lagi, pada periode ini SMP N 8 Padang juga mengalami 2 kali pergantian kepemimpinan dimana pada tahun 2007 ketika RSBI diterapkan SMP N 8 Padang masih dipimpin oleh Ernawati Syafar, S.Pd yang sudah memimpin sejak Juli 1998.

Kepemimpinan Ernawati Syafar, S.Pd disebut sangat berpengaruh terhadap kedudukan SMP N 8 Padang sebagai SMP RSBI pada waktu itu. Selanjutnya, di

satu tahun terakhir sebelum RSBI dihapuskan digantikan oleh Drs. Ahmad Nurben (Maret 2011-Januari 2016) .

Berbeda dengan penelitian terdahulu tentang sekolah, penulis akan memfokuskan kepada perkembangan SMP N 8 Padang selama dua periode yang dikenal dengan Masa RSBI dan Pasca RSBI atau masa dimana SMP N 8 Padang menjadi Sekolah Rujukan dengan Implementasi Kurikulum 2013. Penelitian ini akan mengkaji secara historis terhitung sejak awal mula kebijakan RSBI diberlakukan yang didalamnya akan mencakup perjalanan lika-liku, prestasi, lulusan sekolah RSBI hingga dihapuskan dengan tujuan pengapusan kasta dalam pendidikan.

Penelitian ini penting untuk dikaji karena sekolah merupakan bagian penting dalam sejarah pendidikan. Penelitian ini akan menjadi studi yang relevan untuk sejarah sekolah yang berlandaskan pada kebijakan pendidikan yang mengatur jalannya sistem pendidikan di Indonesia khususnya, Sumatra Barat. Selain itu, belum adanya yang membahas mengenai sekolah dengan aspek predikat sebagai RSBI menjadi modal utama sebagai penulisan sejarah karena didalamnya terdapat unsur sinkronis dan diakronis. SMP N 8 Padang adalah salah satu representasi dari pendidikan yang bertaraf Internasional. Dalam konteks inilah penelitian ini diajukan dengan judul ***“SMP N 8 Padang : Dari RSBI hingga Sekolah Rujukan (2007-2014)”***.

## B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang SMP N 8 Padang dalam perkembangannya sejak ditetapkan menjadi salah satu Sekolah RSBI (2007-2012) di Kota Padang hingga pasca RSBI dihapuskan yaitu pada tahun 2013 sampai tahun 2014. Batasan spasial pada penelitian ini adalah Kota Padang karena sekolah tersebut berlokasi di Padang, Sumatra Barat. Batasan temporal awal adalah tahun 2007 karena pada periode tersebut SMP N 8 Padang berubah status menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan menjadi sekolah pertama pertama di Sumatra Barat dari 100 sekolah RSBI Angkatan I di seluruh Indonesia. Batasan temporal akhir penelitian ini adalah tahun 2014 karena pada tahun tersebut SMP N 8 Padang menjadi Sekolah Rujukan.

Permasalahan yang akan dibahas melalui penulisan ini dapat dikemukakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Mengapa kebijakan RSBI ada di Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan tata kelola, perkembangan guru, siswa dan prestasi sekolah pada masa penerapan Kurikulum RSBI (SNP + X di SMP N 8 Padang periode 2007-2012?
3. Bagaimana perkembangan SMP N 8 Padang setelah kebijakan RSBI dihapuskan dan menjadi sekolah Rujukan (2013-2014) ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas,maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Latar belakang kehadiran kebijakan RSBI di Indonesia
2. Perkembangan SMP N 8 Padang selama menjadi Sekolah RSBI.
3. Perkembangan SMP N 8 Padang setelah RSBI dihapuskan dan pekungannya menjadi Sekolah rujukan dengan Kurikulum 2013.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai memiliki fokus untuk pengembangan ilmu pengetahuan.Hal yang paling utama adalah untuk memperkaya pengetahuan sejarah pendidikan di Indonesia. Sehingga,penelitian ini kelak dapat menjadi referensi dan menambah khazanah pengetahuan akademik khususnya sejarawan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang ingin dicapai memiliki fokus untuk pengembangan ilmu pengetahuan.Hal yang paling utama adalah untuk memperkaya pengetahuan sejarah pendidikan di Indonesia. Sehingga,penelitian ini kelak dapat menjadi referensi dan menambah khazanah pengetahuan akademik khususnya sejarawan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sebuah cerminan tentang perjalanan lika-liku dari pemberlakuan kebijakan Sekolah RSBI di SMP N 8 Padang yang dilihat dari aspek historis. Dapat pula dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan program atau kebijakan RSBI di sekolah ini.

### b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadikan peneliti menjadi pembelajaran sekaligus memperkaya pengetahuan tentang kesejarahan yang ditinjau dari berbagai aspek .

### c. Bagi Pembaca

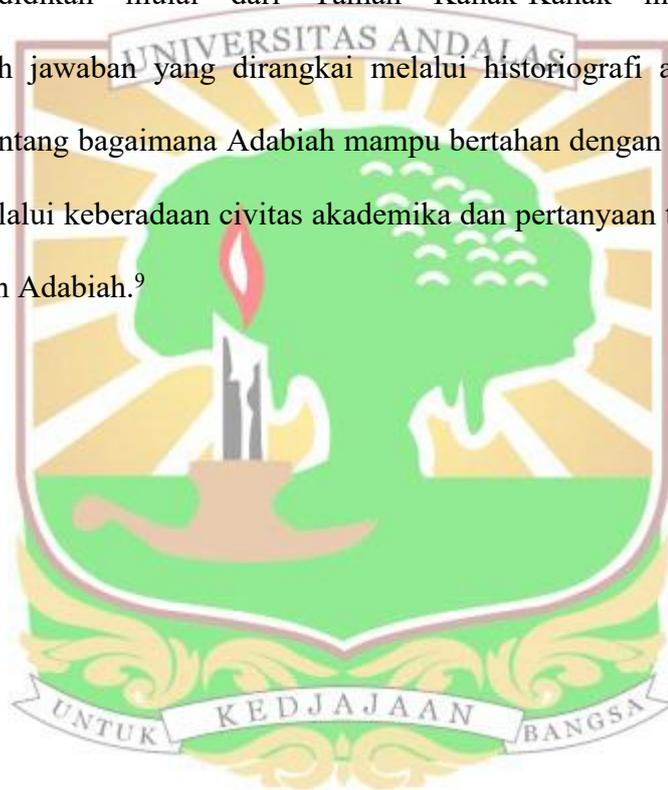
Melalui proses membaca dan menelaah penelitian ini, maka pembaca diharapkan akan dapat mengetahui sejarah tentang SMP N 8 Padang yang pernah menjadi RSBI dan berjaya pada masanya, dan membenarkan persepsi yang salah tentang penerapan kebijakan RSBI di SMP N 8 Padang.

## E. Tinjauan Pustaka

Kajian sejarah tentang sekolah ataupun perguruan melalui Sejarah Pendidikan pada dasarnya telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah buku Martamin ,dkk. dengan judul “Sejarah Pendidikan di Sumatera Barat (1980-1981), tahun 1986”. Buku ini menjelaskan tentang pendidikan Sumatera Barat pada zaman Buddhis India. Pada saat ini, diajarkan tentang adat istiadat

Minangkabau. Selanjutnya model pendidikan zaman penjajahan Belanda yang mengajarkan pendidikan ala Barat ke Jepang masuk ke Sumatera Barat.<sup>8</sup>

Kemudian, buku Gusti Asnan, dkk, yang berjudul “Adabiah : Perintis Pendidikan Moderen di Sumatra Barat”(2013). Hal yang dibahas dalam buku ini adalah tentang tinjauan historis perguruan Adabiah yang tidak dapat dilepaskan dari Abdullah Ahmad sebagai pendirinya. Perguruan Adabiah memiliki banyak jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Tinggi. Sebuah jawaban yang dirangkai melalui historiografi atas pertanyaan pertanyaan tentang bagaimana Adabiah mampu bertahan dengan segala lika liku tantangan melalui keberadaan civitas akademika dan pertanyaan tentang prestasi dan kegagalan Adabiah.<sup>9</sup>



---

<sup>8</sup> Martamin, dkk, *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (1980-1981)* (Jakarta : CV.Eka Dharma,1997),

<sup>9</sup> Gusti Asnan, dkk, *Adabiah : Perintis Pendidikan Moderen di Sumatra Barat*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013),

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Nurul Fadhillah “Ruang Pendidik SMA INS Kayutanam tahun 1967-2010” (2013), menjelaskan perkembangan SMA INS Kayutanam dari tahun 1967-2010.<sup>10</sup>Selanjutnya,Jeffri Adryan “Sistem Pendidikan di Pesantren Terpadu Serambi Mekkah Padang panjang 1997-2010” (2015), menulis tentang sistem pendidikan di Pesantren Terpadu Serambi Mekkah Padang Panjang, dan menjelaskan perkembangannya dari tahun 1997-2010.<sup>11</sup>

Selain itu, penulis juga menjadikan buku yang ditulis oleh Teguh Trwiyanto dan Ahmad Yuduf Sobri yang berjudul “ Panduan Mengelola Sekolah Bertaraf Internasional” Tahun 2010 sebagai salah satu studi relevan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan buku ini berisi berbagai seluk-beluk kebijakan RSBI dan perkembangannya. Berbagai jurnal pendidikan serta kebijakan yang menjadi acuan penelitian ini adalah

Penelitian skripsi tentang sejarah sekolah baru-baru ini juga ditulis oleh Rian Nofiandri “Sekolah Kimia di Kota Padang :Dari SAKMA Hingga SMAKPA (1964-2011),<sup>12</sup>(2017) yang membahas tentang sejarah Perubahan nama dari Sekolah Analis Kimia Menengah Atas (SAKMA) menjadi Sekolah Menengah Analis Kimia Padang (SMAKPA) . Terakhir,penelitian oleh Sarta Anketim yang berjudul “Dari SPG Negeri Painan Ke SMA N 2 Painan : Sejarah Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota Painan Tahun 1961-2015”,(2017)

---

<sup>10</sup> Nurul Fadhillah, *Skripsi* “Ruang Pendidik SMA INS Kayutanam tahun 1967-2010”, (Padang : Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 2013)

<sup>11</sup> Jeffri Adryan,*Skripsi* “Sistem Pendidikan di Pesantren Terpadu Serambi Mekkah Padang panjang 1997-2010”, (Padang : Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 2015),

<sup>12</sup> Rian Nofiandri, *Skripsi* “Sekolah Kimia di Kota Padang :Dari SAKMA Hingga SMAKPA (1964-2011)”,(Padang : Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, 2017)

yang menulis tentang perkembangan Sekolah Pendidikan Guru di Painan hingga berubah menjadi SMA N 2 Painan dengan berbagai sistem tata kelolanya.<sup>13</sup>

## F. Kerangka Analisis

Pengkajian tentang perkembangan sekolah di masa lampau merupakan salah satu kajian mengenai sejarah pendidikan yang memusatkan pada telaahan mengenai proses perkembangan lembaga pendidikan dan pola pendidikan tertentu yang terjadi dan berubah dari masa ke masa.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini peneliti melihat perkembangan sekolah melalui aspek implementasi kebijakan bertaraf Internasional yang pernah berlaku di Indonesia dalam rangka peningkatan mutu atau kualitas pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai salah satu kegiatan kebudayaan, sebagai bagian dari proses regenerasi, sehingga mampu memberikan contoh agar kelak anak cucu kita siap secara jasmani dan rohan untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan melestarikan tradisi orang tua dan nenek moyang mereka.<sup>15</sup>

Menurut UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat (1) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

---

<sup>13</sup> Sarta Anketim, *Skripsi* "Dari SPG Negeri Painan Ke SMA N 2 Painan : Sejarah Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota Painan Tahun 1961-2015", (Padang : Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 2017),

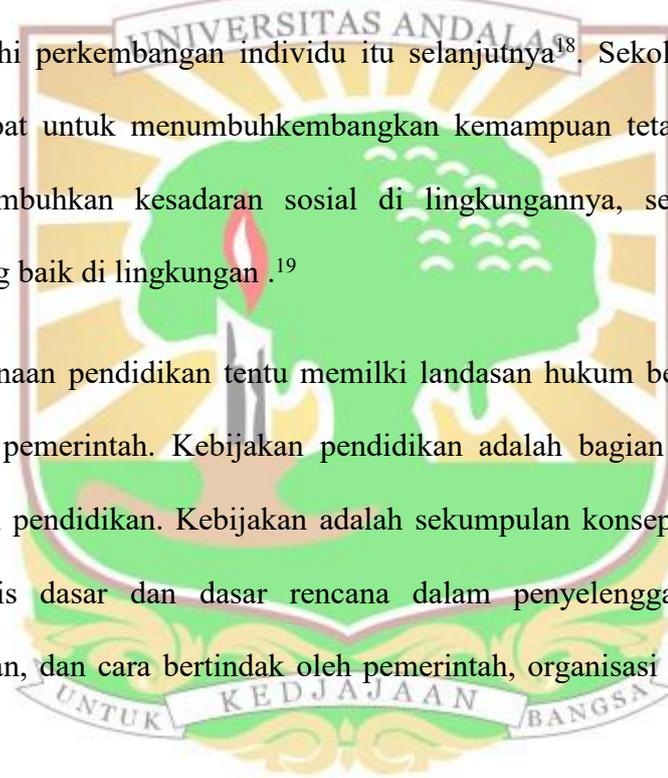
<sup>14</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm 259-260,

<sup>15</sup> Muhammad Rifa'I, *Sejarah Pendidikan Nasional : Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta : AR RUZZ MEDIA, 2016), hlm. 13

masyarakat dan negara. Sedangkan pendidikan nasional adalah pendidikan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia guna meresponi tuntutan zaman.<sup>16</sup>

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.<sup>17</sup> Sekolah merupakan tempat memperoleh pendidikan formal dan pembudayaan di samping di rumah sehingga di masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan individu itu selanjutnya<sup>18</sup>. Sekolah tidak hanya sebagai tempat untuk menumbuhkembangkan kemampuan tetapi juga tempat untuk menumbuhkan kesadaran sosial di lingkungannya, sehingga terjalin interaksi yang baik di lingkungan .<sup>19</sup>

Pelaksanaan pendidikan tentu memiliki landasan hukum berupa kebijakan yang dibuat pemerintah. Kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik dalam pendidikan. Kebijakan adalah sekumpulan konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam penyelenggaraa pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya



---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan dan Sistem Pendidikan Nasional

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan dan Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1

<sup>18</sup> Nur Kholik, "Peran Sekolah Sebagai Lembaga Pengembangan Multikultural", (*Jurnal Tawadhu* Volume 1 Nomor 2 ,2017),hlm.246

<sup>19</sup>Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, Dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.,2005),hlm.40,

yang merupakan pernyataan dari cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai pedoman untuk pencapaian target.<sup>20</sup>

Salah satu kebijakan pendidikan yang dirumuskan oleh pemerintah adalah kebijakan sekolah yang berstatus RSBI. landasan hukum pembentukan RSBI dan SBI mengacu pada pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 (Sisdiknas) Tahun 2003 yang berbunyi “ Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan di semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional”.<sup>21</sup>

Sekolah RSBI atau SBI yang berlabel Internasional adalah Sekolah/Madrasah yang sudah mencukupi kriteria seluruh Standar Nasional Pendidikan yang didalamnya mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Tolak ukur taraf Internasional kemudian diukur dengan standar pendidikan salah satu anggota OECD melalui dua acara yaitu adaptasi dan adopsi.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, materi, dan metode pembelajaran, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan amanat dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 BAB X mengenai kurikulum pasal

---

<sup>20</sup> Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan : Dari Filosofi ke Implementasi*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 31

<sup>21</sup> Dewi Sendhikasari Dharmaningtyas, “Penghapusan Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional” (*Jurnal Politica* Volume. 4 Nomor 2 Tahun 2013), hlm. 271-272

36 ayat (1) yang berbunyi : “Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Dalam penelitian ini kurikulum RSBI merupakan kurikulum Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dengan formula SNP + X. Adapun SNP sesuai Peraturan Pemerintah nomor: 19 tahun 2005 adalah terdiri dari 8 standar antara lain:

1. Standar isi/kurikulum.
2. Standar proses.
3. Standar Kompetensi Lulusan.
4. Standar Penilaian.
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
6. Standar Sarana dan Prasarana.
7. Standar Pengelolaan.
8. Standar Pembiayaan.

### **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah metode sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara multidimensional yang menggunakan ilmu-ilmu bantu sejarah. Tahap pertama dalam metode sejarah adalah Heuristik, yaitu sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau mencari sumber sejarah atau evidensi sejarah. Sumber primer dalam penelitian ini adalah dokumen tertulis yang terdiri dari arsip SMP N 8 Padang, surat keputusan, sertifikat prestasi

sekolah serta dokumentasi pada masa atau periode penelitian, majalah sekolah yang menjadi objek penelitian. Sumber sekunder pada penelitian ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari literatur atau tulisan-tulisan akademis yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber ini dapat ditemukan di, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Kota Padang. Selain itu, proses wawancara juga akan dilakukan untuk memenuhi data penelitian.

Tahapan selanjutnya akan dilakukan kritik terhadap sumber primer dan sekunder yang telah dikumpulkan guna menyingkirkan sekaligus mengkalifikasikan sumber-sumber mana saja yang valid dan orisinal. Pada akhirnya kritik sumber bertujuan untuk mencari kebenaran. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan kritik terhadap sumber-sumber dan data yang ditemukan mengenai SMP N 8 Padang.

Interpretasi atau penafsiran terhadap berbagai sumber yang telah teruji dan telah melalui kritik sumber akan menjadi bahan utama dalam tahapan berikutnya. Pada tahapan interpretasi penulis mulai mencari hubungan antara fakta yang diperoleh dari data terkait SMP N 8 Padang sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Tahap keempat adalah Historiografi atau penulisan sejarah, penulis akan melakukan proses penyusunan beserta uraian dari temuan yang diperoleh berdasarkan 3 tahapan sebelumnya sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menjadi sebuah tulisan sejarah melalui metode sejarah.

## H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka kerangka analisis, metode dan sistematika penulisan.

Bab II penulis akan menjelaskan mengenai perkembangan kebijakan di dunia pendidikan di Indonesia dari masa ke masa, Sekolah Menengah Pertama yang berstatus RSBI di Indonesia dan Sekolah Menengah Pertama yang berstatus RSBI di Sumatra Barat serta kritik terhadap RSBI.

Pada Bab III akan membahas SMP N 8 Padang sebagai Sekolah RSBI periode 2007 hingga 2012 , terkait dengan perkembangan peserta didik, tata kelola dan struktur sekolah, perkembangan guru,sarana dan prasarana serta implementasi kurikulum Internasional.

Bab IV akan membahas SMP N 8 Padang sebagai Sekolah Rujukan yakni terhitung di tahun 2013 hingga 2014 yang didalamnya juga mencakup tata kelola,perubahan kurikulum RSBI menjadi Kurikulum 2013.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi saran dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian.



